



**PERAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM PENDAMPINGAN
PEMBELAJARAN DI SEKOLAH BINAAN SMP**

**Naomi Kogoya¹, Yulius Mataputun², Juliana Waromi³ C. Tanta⁴, Robert Masreng⁵,
Monika Gultom⁶**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih^{1,2,3,4,5,6}

e-mail:

naomikogoya3@gmail.com¹, yuliusmataputun1965@gmail.com², jullywr77@gmail.com³,
tanta@fkip.uncen.ac.id⁴, masrengrobert@yahoo.co.id⁵, monikagultom73@gmail.com⁶

Diterima: 30/5/2026; Direvisi: 10/6/2026; Diterbitkan: 17/6/2026

ABSTRAK

Pergeseran fungsi inspektif pengawas menjadi mitra pendamping dalam pilar Merdeka Belajar guna meningkatkan mutu pendidikan nasional melatarbelakangi penelitian ini. Masalah tersebut menuntut adanya rekonstruksi tata kelola kepengawasan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang rentan mengalami stagnasi manajerial. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran pengawas sekolah dalam pendampingan pembelajaran di SMP Negeri 4 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus eksploratif diterapkan, di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap enam informan terpilih, dan studi dokumentasi terhadap profil sekolah yang membina 161 siswa. Teknik analisis data dijalankan secara interaktif melalui tahapan kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peran pengawas belum berjalan optimal dan masih terjebak pada pola administratif-konvensional, yang dibuktikan dengan ketiadaan program kerja resmi sejak 2018 serta minimnya supervisi klinis. Simpulan utama menegaskan bahwa efektivitas pendampingan terhambat secara sistemik oleh kendala geografis ekstrem, beban kerja berlebih, dan ketiadaan akses listrik. Riset ini merekomendasikan penerapan Model Pendampingan Refleksi-Kontekstual melalui strategi kunjungan blok intensif dan pemanfaatan media alam lokal demi mewujudkan pemerataan standar mutu pendidikan yang berkelanjutan di pedalaman Papua.

Kata Kunci: *Pengawas Sekolah, Pendampingan Pembelajaran, Supervisi Kolaboratif, Papua Pegunungan.*

ABSTRACT

The shift in the supervisory function of supervisors to become partners in the Freedom to Learn pillar to improve the quality of national education is the background to this research. This issue demands a reconstruction of supervisory governance in underdeveloped, frontier, and outermost (3T) regions that are vulnerable to managerial stagnation. The focus of this research is to analyze the role of school supervisors in supporting learning at SMP Negeri 4 Wamena, Jayawijaya Regency, Papua Mountains Province. A qualitative approach with an exploratory case study design was applied, where data were collected through participant observation, in-depth interviews with six selected informants, and a documentary study of the school profile that mentors 161 students. Data analysis techniques were carried out interactively through stages of condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research findings reveal that the supervisory role has not been optimal and remains trapped in administrative-conventional patterns, as evidenced by the absence of an official work program since 2018 and



minimal clinical supervision. The main conclusion confirms that the effectiveness of mentoring is systemically hampered by extreme geographic constraints, excessive workloads, and lack of access to electricity. This research recommends the implementation of the Reflection-Contextual Mentoring Model through an intensive block visit strategy and the use of local natural media to realize the equal distribution of sustainable education quality standards in the interior of Papua.

Keywords: *School Supervisor, Learning Assistance, Collaborative Supervision, Highland Papua.*

PENDAHULUAN

Transformasi fundamental dalam sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini tengah berada pada titik nadir perubahan paradigma yang dipicu oleh implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan ini menuntut redefinisi peran seluruh aktor pendidikan, mulai dari tingkat kementerian hingga ke ruang-ruang kelas di pelosok negeri. Salah satu perubahan paling krusial adalah transformasi peran pengawas sekolah dari fungsi inspektif yang bersifat menilai menjadi fungsi pendampingan yang bersifat memberdayakan. Pendampingan pembelajaran oleh pengawas sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu hasil belajar peserta didik. Supervisi dan pendampingan harus berorientasi pada pengembangan kompetensi guru, bukan sekadar penilaian administratif yang kaku. Melalui kegiatan pembimbingan, pemantauan, dan evaluasi, pengawas berfungsi sebagai fasilitator dalam penerapan strategi pembelajaran yang efektif. Pengawas yang mampu membangun hubungan kolaboratif dengan guru akan lebih mudah menumbuhkan budaya belajar di sekolah yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan (Sapwan et al., 2025). Secara regulatif, transformasi peran pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan telah diformalkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama pelaksanaan siklus pendampingan dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2023). Peran baru ini menuntut pengawas untuk menguasai keterampilan *coaching* dan *mentoring* guna mendampingi kepala sekolah dalam mengelola perubahan di tingkat satuan pendidikan, terutama dalam menghadapi transisi kurikulum yang dinamis.

Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan daerah dengan tantangan pendidikan yang sangat kompleks dan spesifik. Berdasarkan data demografis pendidikan di wilayah ini, terdapat kesenjangan capaian yang sangat nyata, di mana sekitar 7,25% masyarakat tidak atau belum pernah mengesep bangku sekolah, dan 13,64% masyarakat belum tamat Sekolah Dasar. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam akses dan keberlanjutan pendidikan, yang diperparah oleh medan geografis pegunungan yang sulit dijangkau dan sebaran sekolah yang terisolasi. Lemahnya pengawasan kebijakan selama masa Otonomi Khusus juga berkontribusi pada rendahnya disiplin pendidik dan ketimpangan kualitas antara pusat kota Wamena dengan distrik-distrik pedalaman. Hal ini menegaskan perlunya supervisi dan pendampingan yang jauh lebih efektif, kontekstual, dan berkesinambungan dari pengawas sekolah untuk menjamin hak belajar anak-anak di Papua Pegunungan (Eloper et al., 2025). Fakta di lapangan pada SMP Negeri 4 Wamena memberikan gambaran nyata tentang tantangan operasional yang dihadapi. Sekolah ini memiliki struktur yang didukung oleh satu kepala sekolah, 12 guru, serta komite sekolah yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam program sekolah. Pengawas sekolah selama ini telah hadir dalam penyusunan program kerja



dan rapat sekolah untuk memberikan masukan serta arahan, namun praktiknya masih didominasi oleh observasi kelas dan nasehat lisan tanpa dokumentasi sistematis yang memadai.

Kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan regulasi dengan realitas aktual di lapangan terlihat sangat kontras pada tata kelola administrasi kepengawasan. Salah satu temuan krusial adalah ditemukannya program kerja pengawas tahunan terakhir yang terdokumentasi berasal dari tahun 2018 dengan pendekatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang tentu sudah tidak relevan dengan kebijakan Merdeka Belajar saat ini. Selain itu, ketiadaan akses listrik di sekolah menjadi penghalang besar bagi implementasi digitalisasi pembelajaran, sementara kompetensi dasar siswa dalam membaca dan menulis di jenjang menengah masih menjadi kendala serius yang memerlukan intervensi khusus (Wicaksono & Zakso, 2025). Evaluasi terhadap literatur relevan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang nyata untuk konteks daerah terpencil di Papua. Penelitian oleh Sapwan et al. (2025) memberikan kerangka supervisi ideal namun mengasumsikan ketersediaan administrasi yang stabil, yang sangat kontras dengan temuan stagnasi dokumen KTSP 2018 di lokasi penelitian. Marpaung (2025) juga mencatat bahwa implementasi kurikulum di Papua sering kali terkesan kaku karena kurangnya pendampingan yang kontekstual terhadap keterbatasan sarana. Tanpa adanya model pendampingan yang adaptif, pengawas sekolah akan kesulitan memandu guru keluar dari belenggu ketertinggalan fasilitas pendidikan.

Nilai kebaharian penelitian ini terletak pada analisis peran pengawas sebagai pendamping satuan pendidikan di sekolah tanpa listrik yang harus melakukan lompatan paradigma langsung ke Kurikulum Merdeka. Penelitian ini berupaya merumuskan model pendampingan adaptif yang mampu mengatasi anomali pendidikan, di mana pengawas harus mendampingi guru SMP dalam mengajarkan literasi dasar akibat rendahnya *input* kemampuan siswa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (Marpaung, 2025). Tujuan utama dari penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pemecahan masalah kepengawasan di wilayah khusus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawas sekolah dalam penyusunan perencanaan kerja serta mendampingi perencanaan program sekolah di SMP Negeri 4 Wamena, Papua Pegunungan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawas dalam pendampingan pembelajaran dan pelaksanaan pelaporan kinerja yang sistematis di sekolah tersebut. Lebih jauh, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas peran pengawas di sekolah binaan. Melalui pendekatan kualitatif, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan sebuah model pendampingan pembelajaran yang responsif dan kontekstual berdasarkan praktik nyata pengawas sekolah.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat merumuskan sebuah model pendampingan pembelajaran yang responsif dan kontekstual berdasarkan praktik nyata pengawas sekolah di SMP Negeri 4 Wamena, guna meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua Pegunungan. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan manajemen pendidikan, khususnya mengenai pengawasan kontekstual di wilayah dengan keterbatasan ekstrem. Secara praktis, model adaptif yang dihasilkan dapat menjadi rujukan operasional bagi pengawas sekolah lain yang bertugas di daerah terpencil untuk melakukan fungsi bimbingan secara fleksibel namun tetap terarah. Selain itu, temuan ini dapat memberikan masukan strategis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dalam merumuskan kebijakan pelatihan pengawas yang tidak hanya berfokus pada kecakapan digital, melainkan pada kemampuan *coaching* literasi dasar. Dengan menyinkronkan peran pengawas sebagai mitra strategis kepala sekolah dan guru, proses transisi kurikulum diharapkan dapat



berjalan lebih humanis tanpa menimbulkan beban administratif baru. Langkah inovatif ini menjadi fondasi penting untuk memutus rantai ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan distrik pedalaman di bumi Papua demi mewujudkan hak belajar anak secara adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif eksploratif ini menerapkan desain studi kasus deskriptif guna mengkaji peran pengawas sekolah di wilayah khusus secara mendalam dan interaktif. Riset dilaksanakan di SMP Negeri 4 Wamena, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tata letak strategis serta kemudahan akses mobilitas pengumpulan data. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* atau instrumen utama yang mengamati fenomena sosiopedagogis secara alami pada *naturalistic setting* tanpa melakukan intervensi statistik terhadap variabel sekolah (Sugiyono, 2025). Prosedur pelaksanaan direncanakan berlangsung selama 7 bulan, terhitung sejak Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Alur kerja dibagi ke dalam 5 tahapan sistematis yang mencakup studi eksplorasi awal, penyusunan proposal, seminar, penelitian lapangan, hingga finalisasi laporan. Karakteristik lokasi riset di zona 3 ini memberikan kontribusi penting untuk memetakan strategi pendampingan adaptif di tengah keterbatasan sarana prasarana sekolah secara kontekstual (Eloper dkk., 2025).

Proses pengumpulan data primer dihimpun langsung melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam *semi-structured* bersama kepala sekolah serta 13 orang guru. Sementara itu, data sekunder diperoleh lewat studi dokumentasi arsip laporan kerja pengawas tahun 2018 dan profil sekolah (Romdona dkk., 2025). Alat bantu yang digunakan meliputi alat perekam audio dan lembar catatan lapangan untuk mendokumentasikan pola komunikasi di satuan pendidikan. Analisis data kuantitatif pendukung organisasi disajikan dalam angka tekstual, seperti jumlah 13 informan guru dan 5 tahapan pelaksanaan. Data kualitatif diolah mengikuti model interaktif yang melingkupi tahapan *data reduction* untuk memfokuskan transkrip wawancara, *data display* dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan (Miles dkk., 2023). Guna menghindari penemuan objektif yang bias, pengujian keabsahan temuan dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan akuntabilitas hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Guna menjamin derajat kepercayaan (*credibility*) dan keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti menerapkan strategi triangulasi yang sistematis. Triangulasi dalam penelitian ini berfungsi untuk menyilangkan informasi dari berbagai perspektif dan teknik guna meminimalisir bias subjektivitas peneliti serta memastikan bahwa temuan di lapangan benar-benar mencerminkan realitas praktik pendampingan di wilayah 3T.

Tabel 1. Hasil penelitian

Fokus Penelitian	Triangulasi Sumber (Informan)	Triangulasi Teknik (Metode)
Penyusunan Perencanaan Kerja Pengawas	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum	Wawancara, Studi Dokumentasi (Program Kerja 2018/2024)



Pendampingan Perencanaan Program Sekolah	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran	Wawancara, Observasi Rapat, Studi Dokumen RKS/RKAS
Pendampingan Pelaksanaan Pembelajaran	Pengawas Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Kepala Sekolah	Wawancara, Observasi Kelas, Studi Modul Ajar/RPP
Pelaporan Kinerja Pengawas	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan	Wawancara, Studi Dokumen Laporan Kinerja
Faktor Pendukung dan Penghambat	Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah	Wawancara Mendalam, Observasi Kondisi Geografis/Listrik
Perumusan Model Pendampingan	Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran	Wawancara, Observasi Siklus Pendampingan, Catatan Lapangan

Tabel 1 mekanisme triangulasi dalam penelitian ini dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber diimplementasikan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan membandingkan data hasil wawancara antara pengawas sekolah (sebagai pendamping), kepala sekolah (sebagai manajer), dan guru (sebagai subjek yang didampingi). Hal ini sangat krusial mengingat adanya kesenjangan dokumentasi di SMP Negeri 4 Wamena, di mana program kerja terakhir yang ditemukan berasal dari tahun 2018. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat memverifikasi apakah praktik pendampingan yang terjadi saat ini sudah sesuai dengan regulasi terbaru atau masih terjebak pada pola lama, meskipun bukti administratifnya belum terdata secara digital (Miles, Huberman, & Saldaña, 2023).

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk sumber data yang sama secara serempak. Peneliti tidak hanya mengandalkan jawaban informan melalui wawancara, tetapi juga melakukan observasi partisipatif untuk melihat langsung bagaimana interaksi coaching berlangsung di dalam kelas atau dalam pertemuan Komunitas Belajar (Kombel). Data tersebut kemudian dikonfrontasikan dengan bukti dokumentasi berupa catatan tindak lanjut lisan atau arsip sekolah. Di wilayah dengan kendala infrastruktur seperti Distrik Hubikosi, triangulasi teknik membantu peneliti memastikan bahwa strategi "pendampingan adaptif" yang diklaim oleh informan memang benar-benar terwujud dalam aksi nyata di lapangan, terutama dalam menangani siswa yang belum lancar membaca (Sugiyono, 2025).

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan member check untuk menjamin bahwa interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Proses ini dilakukan dengan cara mengekspos kembali draf temuan kepada para informan di SMP Negeri 4 Wamena untuk mendapatkan konfirmasi atau koreksi. Langkah ini sangat penting dalam konteks sosiokultural Papua Pegunungan guna menghindari kesalahan persepsi terhadap istilah-istilah lokal atau dinamika sosial yang memengaruhi proses pendidikan. Dengan demikian, validitas data tetap terjaga meskipun peneliti menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan akses informasi digital selama proses penelitian berlangsung (Marpaung, 2025).

Seluruh tahapan pemeriksaan keabsahan data ini dirancang untuk mendukung model analisis interaktif, sehingga kesimpulan yang ditarik nantinya bersifat kredibel dan dapat



dipertanggungjawabkan (confirmability). Peneliti memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada data lapangan yang telah terverifikasi melalui audit trail, mulai dari rekaman wawancara hingga foto-foto dokumentasi fisik di sekolah binaan. Pendekatan ini memastikan bahwa meskipun dilakukan di wilayah terpencil dengan tantangan listrik dan sinyal, kualitas metodologis penelitian ini tetap memenuhi standar akademik nasional (Romdona, Junista, & Gunawan, 2025).

Pembahasan

Peran Pengawas Sekolah dalam Penyusunan Perencanaan Kerja

Penyusunan perencanaan kerja pengawas di SMP Negeri 4 Wamena menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara regulasi ideal dengan realitas operasional. Temuan penelitian yang menyatakan bahwa pengawas tidak memiliki program kerja resmi tahunan atau semester mencerminkan lemahnya fungsi perencanaan yang seharusnya menjadi fondasi utama supervisi. Berdasarkan Perdirjen GTK No. 4831 Tahun 2023, perencanaan pendampingan seharusnya disusun berdasarkan analisis data Rapor Pendidikan untuk memetakan kebutuhan spesifik sekolah binaan. Tanpa perencanaan yang sistematis, kehadiran pengawas di sekolah hanya menjadi rutinitas administratif tanpa arah pengembangan mutu yang jelas. Kondisi ini memperparah ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman Papua karena sekolah tidak memiliki panduan strategis dalam meningkatkan standar layanan pembelajarannya (Perdirjen GTK No. 4831, 2023).

Kesenjangan ini semakin nyata jika dibandingkan dengan hasil penelitian Sapwan dkk. (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas supervisi dimulai dari koordinasi tim kerja dan penentuan instrumen pengawasan yang objektif di tahap perencanaan. Di SMP Negeri 4 Wamena, ketiadaan dokumen rencana kerja sejak tahun 2018 menunjukkan adanya stagnasi manajerial yang menghambat transformasi pendidikan. Hal ini sejalan dengan teori bahwa perencanaan yang buruk akan menghasilkan pelaksanaan yang sporadis dan tidak terukur. Pengawas cenderung hanya hadir pada momen seremonial seperti pembagian rapor karena tidak adanya agenda pendampingan akademik yang terjadwal. Akibatnya, fungsi pengawas sebagai motor penggerak perubahan tidak dapat berjalan secara optimal di lingkungan sekolah binaan (Sapwan dkk., 2025).

Faktor aksesibilitas dan beban kerja juga menjadi alasan klasik di balik lemahnya perencanaan kerja pengawas di wilayah Jayawijaya. Penelitian Elopere dkk. (2025) menyoroti bahwa pengawasan kebijakan di daerah pedalaman sering kali terabaikan akibat sulitnya medan geografis dan terbatasnya anggaran operasional. Di SMP Negeri 4 Wamena, pengawas terjebak pada pola kerja konvensional yang lebih mengutamakan aspek administratif daripada substansi pedagogis. Ketidaktersediaan jadwal supervisi yang pasti membuat pihak sekolah tidak memiliki kesiapan mental dan dokumen untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Transformasi pengawas menjadi pendamping menuntut adanya perubahan paradigma dalam menyusun rencana kerja yang lebih adaptif dan berbasis pada kenyataan lapangan di wilayah 3T (Elopere dkk., 2025).

Secara teoretis, perencanaan supervisi seharusnya melibatkan dialog awal dengan kepala sekolah untuk membangun komitmen perubahan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengawas lebih banyak bertindak secara sepihak atau bahkan absen dalam proses perencanaan program sekolah. Minimnya analisis kebutuhan guru menyebabkan program pendampingan yang ada—jika pun ada—menjadi tidak relevan dengan masalah nyata di kelas, seperti rendahnya kemampuan literasi dasar siswa. Kurangnya budaya dokumentasi di pihak pengawas membuat setiap periode kepengawasan kehilangan jejak rekam perbaikan yang



telah dilakukan. Kondisi ini menuntut adanya sistem perencanaan digital yang lebih sederhana namun konsisten agar dapat dipantau oleh Dinas Pendidikan (Werdiningsih, 2024).

Selain itu, transisi dari Kurikulum KTSP 2018 langsung menuju Kurikulum Merdeka tanpa perencanaan yang matang menciptakan kebingungan di tingkat implementasi. Guru merasa terbebani oleh tuntutan kurikulum baru sementara pengawas sebagai pembina belum memberikan peta jalan (roadmap) yang jelas melalui dokumen rencana kerja. Lemahnya perencanaan ini juga berkaitan dengan kurangnya penguatan karakter kepemimpinan yang mampu menggerakkan visi sekolah secara visioner. Di SMP Negeri 4 Wamena, perencanaan pengawas yang belum tersosialisasi mencerminkan lemahnya komunikasi organisasi. Dibutuhkan upaya penguatan kompetensi manajerial bagi pengawas agar mampu menyusun rencana pendampingan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjawab tantangan pendidikan di Papua (Majdi, 2023).

Terakhir, ketidakhadiran program kerja resmi pengawas dalam jangka waktu lama menunjukkan adanya masalah dalam sistem akuntabilitas kinerja. Regulasi Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya telah memberikan fleksibilitas bagi pengawas untuk menyusun rencana kerja berbasis hasil, namun tanpa pengawasan dari instansi pembina, fleksibilitas ini justru berujung pada pengabaian tugas pokok. Pengawas di daerah terpencil membutuhkan dukungan tambahan baik secara teknis maupun finansial untuk dapat menyusun perencanaan yang berkualitas. Model perencanaan yang diharapkan harus mencakup jadwal kunjungan rutin yang transparan agar guru memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran. Kejelasan rencana kerja akan menjadi langkah awal untuk mengembalikan marwah pengawas sebagai pendamping profesional (Karuru dkk., 2024).

Peran Pengawas Sekolah dalam Pendampingan Perencanaan Program Sekolah

Pendampingan perencanaan program sekolah di SMP Negeri 4 Wamena masih berada pada level pemberian arahan umum yang tidak mendalam. Meskipun pengawas mengklaim telah memberikan masukan, guru merasa pendampingan tersebut belum menyentuh aspek teknis penyusunan Modul Ajar atau penyesuaian kurikulum dengan karakteristik lokal. Berdasarkan teori pendampingan, pengawas seharusnya berperan sebagai fasilitator yang membantu sekolah merumuskan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) secara kolaboratif. Namun, keterbatasan frekuensi kunjungan menyebabkan guru lebih banyak bekerja secara mandiri atau melalui diskusi internal tanpa bimbingan ahli. Hal ini menciptakan risiko terjadinya kesalahan interpretasi terhadap standar capaian pembelajaran yang ditetapkan secara nasional (Perdirjen GTK No. 4831, 2023).

Temuan bahwa guru lebih mengandalkan diskusi sesama rekan sejawat menunjukkan bahwa Komunitas Belajar (Kombel) intra-sekolah menjadi katup penyelamat di tengah minimnya peran pengawas. Kolaborasi antar guru adalah kunci sukses dalam implementasi kurikulum, terutama saat sumber daya eksternal terbatas. Namun, tanpa sentuhan pengawas sebagai "pendamping ahli", inovasi di Kombel sering kali berhenti pada taraf pemecahan masalah teknis harian, bukan pada peningkatan kualitas instruksional. Pengawas seharusnya hadir untuk memberikan penguatan teoretis dan metodologis agar perencanaan program sekolah memiliki standar kualitas yang tinggi. Gap ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran pengawas dalam memfasilitasi diskusi akademik yang lebih mendalam (Trisnani dkk., 2024).

Kesenjangan lain terlihat pada aspek penyusunan program sekolah yang belum sepenuhnya berbasis data Rapor Pendidikan. Di era Merdeka Belajar, pengawas memiliki tugas krusial untuk membimbing sekolah dalam melakukan Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB)



berdasarkan profil pendidikan sekolah. Temuan di SMP Negeri 4 Wamena menunjukkan bahwa diskusi mengenai Rapor Pendidikan belum menjadi agenda utama dalam pendampingan perencanaan. Hal ini berakibat pada penyusunan program sekolah yang tidak tepat sasaran dan tidak menjawab akar masalah, seperti rendahnya nilai literasi dan numerasi siswa. Pendampingan yang efektif seharusnya mendorong kepala sekolah untuk berani merefleksikan kelemahan sekolah dan merumuskan strategi perbaikan yang konkret dalam rencana kerja sekolah (Perdirjen GTK No. 4831, 2023).

Secara metodologis, metode pendampingan yang digunakan masih didominasi oleh pelatihan satu arah, bukan coaching yang memberdayakan. Pendampingan yang efektif menuntut karakter kepemimpinan kepala sekolah yang kuat untuk menginternalisasi karakter positif dalam mengelola program sekolah secara mandiri. Di SMP Negeri 4 Wamena, pengawas belum sepenuhnya menerapkan teknik bertanya yang reflektif untuk memancing solusi kreatif dari guru. Pendampingan yang bersifat instruktif justru membuat guru merasa pasif dan hanya menunggu arahan, sehingga kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang kontekstual bagi siswa Papua menjadi terhambat. Transformasi peran pengawas menuntut penguasaan keterampilan coaching agar pendampingan perencanaan program sekolah menjadi lebih bermakna (Mataputun, 2022).

Gap antara kebijakan digitalisasi dengan realitas infrastruktur di Hubikosi juga menjadi hambatan serius dalam pendampingan perencanaan. Di saat pemerintah pusat mendorong penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) sebagai sumber utama perencanaan, sekolah binaan di Wamena terkendala ketiadaan listrik. Pengawas sekolah seharusnya berperan sebagai jembatan yang mampu menerjemahkan modul digital ke dalam bentuk yang lebih adaptif bagi kondisi sekolah tanpa listrik. Namun, temuan menunjukkan bahwa pengawas belum memberikan alternatif solusi yang memadai terhadap kendala infrastruktur tersebut. Inovasi supervisi sangat diperlukan untuk mencapai pemerataan standar mutu di daerah dengan keterbatasan fasilitas (Wicaksono & Zakso, 2025).

Pada akhirnya, efektivitas pendampingan perencanaan program sangat bergantung pada frekuensi dan kualitas interaksi akademik serta integritas kepemimpinan di tingkat sekolah. Keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar sangat bergantung pada kualitas pendampingan pengawas sekolah yang mampu menjembatani gap antara kebijakan dengan praktik di kelas melalui penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah. Diperlukan upaya sistematis untuk mengatur jadwal pendampingan khusus yang fokus pada pengembangan perangkat ajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa di Papua Pegunungan (Mataputun, 2022).

Peran Pengawas Sekolah dalam Pendampingan Pelaksanaan Pembelajaran

Pendampingan pelaksanaan pembelajaran melalui supervisi akademik di SMP Negeri 4 Wamena belum berjalan secara rutin dan terencana. Temuan yang menunjukkan bahwa pengawas jarang melakukan observasi kelas berimplikasi pada hilangnya peluang bagi guru untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai praktik mengajarnya. Padahal, inti dari pendampingan pengawas adalah "membersamai" guru dalam proses transformasi di ruang kelas. Menurut teori supervisi klinis, observasi kelas yang diikuti dengan dialog reflektif adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Di wilayah Wamena, fungsi ini sering kali dilimpahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah, sementara pengawas lebih banyak berperan sebagai tamu seremonial yang hanya melihat permukaan administrasi saja (Asyifah, Suryaningsih, & Nurman, 2024).

Kesenjangan ini menciptakan stigma bahwa pengawas sekolah adalah sosok "jaksa" atau penilai kinerja yang menakutkan, bukan mitra yang mendukung kemajuan pembelajaran.



Berdasarkan arahan BGTK Provinsi Papua, kehadiran pengawas seharusnya memberikan rasa nyaman dan keamanan psikologis bagi sekolah. Namun, di SMP Negeri 4 Wamena, jarang dilakukannya kunjungan kelas membuat interaksi antara pengawas dan guru menjadi kaku dan formal. Hal ini menghambat terjadinya proses refleksi yang jujur mengenai kendala pembelajaran di lapangan, seperti masalah penguasaan literasi dasar siswa. Pendampingan yang ideal menuntut pengawas untuk berani masuk ke ruang kelas, melihat realitas, dan memberikan solusi yang kontekstual bagi guru (Perdirjen GTK No. 4831, 2023).

Gap analisis menunjukkan bahwa metode pendampingan instruksional belum sepenuhnya diadopsi oleh pengawas di Jayawijaya. Pendampingan pengawas menjadi instrumen penting untuk mengurangi resistensi guru terhadap kurikulum baru. Di sekolah binaan, guru melaksanakan pembelajaran secara mandiri tanpa adanya bimbingan teknik mengajar yang lebih modern dan berpasat pada siswa. Pengawas belum secara intensif mendampingi guru dalam menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang sangat dibutuhkan oleh siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam di pedalaman Papua. Ketiadaan contoh nyata dari pengawas membuat guru ragu-ragu untuk melakukan inovasi metode mengajar di kelas (Silvester, Saputro, & Manggu, 2024).

Lemahnya supervisi akademik juga berdampak pada kualitas penilaian hasil belajar siswa. Pengawas seharusnya mendampingi guru dalam menyusun dan melaksanakan asesmen yang autentik sesuai prinsip Kurikulum Merdeka. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pengawas memberikan masukan secara umum saja tanpa melihat instrumen penilaian yang digunakan oleh guru di kelas. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data dalam mengukur capaian belajar siswa, yang pada gilirannya akan memengaruhi kualitas data Rapor Pendidikan sekolah. Pelaksanaan supervisi seharusnya mencakup kunjungan langsung dan pemeriksaan administrasi pembelajaran secara detail untuk memperkuat kompetensi guru (Sapwan dkk., 2025).

Dalam konteks sekolah di daerah terpencil seperti Hubikosi, pendampingan pembelajaran seharusnya bersifat lebih fleksibel dan adaptif. Mengingat beban pengawas yang mengampu banyak sekolah dengan jarak tempuh yang jauh, strategi pendampingan "mengingat" atau kunjungan intensif beberapa hari seharusnya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan waktu. Namun, temuan menunjukkan bahwa pengawas cenderung hanya melakukan kunjungan singkat yang tidak mendalam. Kondisi ini membuat fungsi pembimbingan profesional menjadi tidak efektif karena tidak adanya waktu yang cukup untuk melakukan observasi, umpan balik, dan refleksi secara utuh dalam satu siklus pendampingan yang sehat (Isbianti dkk., 2021).

Secara sosiokultural, pengawas sekolah di Papua juga perlu berperan sebagai motivator bagi guru-guru yang bertugas di daerah sulit. Pendampingan pembelajaran bukan hanya soal teknik mengajar, tetapi juga soal memberikan dukungan mental dan apresiasi terhadap dedikasi pendidik di pedalaman. Ketiadaan pengawas di ruang kelas membuat guru merasa aspirasi dan kesulitan mereka tidak didengar oleh otoritas pendidikan. Model pendampingan yang berfokus pada penguatan kapasitas dan rasa memiliki guru terhadap keberhasilan siswa adalah kunci untuk meningkatkan mutu hasil belajar di SMP Negeri 4 Wamena (Marpaung, 2025).

Peran Pengawas Sekolah dalam Melakukan Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja pengawas di SMP Negeri 4 Wamena menunjukkan kelemahan yang signifikan dalam hal sistem administrasi dan akuntabilitas. Temuan penelitian yang menyatakan tidak adanya laporan tertulis sejak tahun 2018 mengindikasikan terputusnya rantai informasi hasil supervisi kepada pihak sekolah maupun instansi terkait. Laporan pendampingan seharusnya menjadi dokumen rekam medik bagi sekolah yang memuat catatan kemajuan,



kendala, dan rekomendasi tindak lanjut. Tanpa laporan tertulis, setiap masukan yang diberikan secara lisan oleh pengawas cenderung mudah terlupakan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk ditindaklanjuti dalam anggaran sekolah atau program kedinasan (Permenpan RB No. 1, 2023).

Kesenjangan ini berlawanan dengan prinsip akuntabilitas dalam Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, yang mewajibkan pengawas untuk mendokumentasikan setiap siklus pendampingan. Pelaporan yang bersifat lisan saja tidak mencukupi untuk melakukan evaluasi jangka panjang terhadap profesionalisme guru. Evaluasi menggunakan instrumen kinerja adalah tolok ukur utama dalam menentukan keberhasilan supervisi. Di SMP Negeri 4 Wamena, ketidakadaan bukti dukung tertulis membuat sekolah sulit untuk membuktikan kemajuan yang telah dicapai dalam akreditasi sekolah. Pelaporan yang sistematis adalah bentuk perlindungan profesional baik bagi pengawas maupun bagi sekolah binaan (Sapwan dkk., 2025).

Selain masalah ketiadaan dokumen fisik, pelaporan kinerja juga terkendala oleh sistem pelaporan digital yang belum sinkron dengan kondisi di daerah. Pemerintah pusat telah merilis sistem Pengelolaan Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS) yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, namun implementasinya di Jayawijaya masih terhambat oleh masalah koneksi internet dan literasi digital. Pengawas sering kali mengalami kesulitan teknis dalam memasukkan data hasil pendampingan ke platform digital, yang akhirnya membuat mereka enggan melakukan pelaporan secara rutin. Hal ini menyebabkan capaian kinerja pengawas di wilayah Papua sering kali tampak rendah di database nasional, meskipun mungkin mereka telah melakukan upaya di lapangan (S_R94).

Rekomendasi yang disampaikan secara lisan tanpa laporan tertulis juga menghambat fungsi advokasi pengawas kepada Dinas Pendidikan. Laporan hasil pendampingan seharusnya menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan perbaikan sarana di Hubikosi. Tanpa dokumen resmi, keluhan sekolah mengenai ketiadaan listrik di SMP Negeri 4 Wamena tidak terdokumentasi secara birokratis sebagai temuan pengawas. Lemahnya monitoring membuat aspirasi sekolah pedalaman sering kali tidak mendapat tanggapan cepat dari pengambil kebijakan. Laporan kinerja yang berkualitas adalah alat perjuangan bagi sekolah-sekolah di wilayah terpencil (Eloper dkk., 2025).

Gap analisis pelaporan juga menunjukkan lemahnya budaya refleksi berkelanjutan di pihak pengawas. Siklus pendampingan menekankan bahwa laporan tahun berjalan harus menjadi acuan perencanaan tahun berikutnya. Karena laporan terakhir ditemukan tahun 2018, maka tidak ada kesinambungan program pengawasan selama hampir tujuh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan setiap pengawas baru yang bertugas di SMP Negeri 4 Wamena harus memulai dari nol tanpa mengetahui riwayat pembinaan sebelumnya. Dokumentasi yang buruk adalah bentuk pemborosan energi intelektual karena setiap kemajuan tidak terdata dan setiap kesalahan cenderung terulang kembali (Miles dkk., 2023).

Untuk memperbaiki sistem pelaporan ini, diperlukan penguatan tata kelola administrasi di tingkat Koordinator Pengawas (Korwas) dan dukungan teknologi yang lebih ramah bagi daerah terpencil. Laporan tidak harus selalu rumit dan panjang; yang terpenting adalah memuat temuan kunci dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama antara pengawas dan kepala sekolah. Penggunaan aplikasi pendampingan sederhana yang dapat bekerja secara luring bisa menjadi solusi bagi pengawas di Wamena. Dengan laporan yang tertib, peran pengawas sebagai pendamping akan memiliki dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan mutu pendidikan secara terukur dan akuntabel (Sapwan dkk., 2025).



Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pengawas Sekolah

Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi peran pengawas di SMP Negeri 4 Wamena menunjukkan adanya kontradiksi antara motivasi internal dengan hambatan eksternal yang sangat berat. Faktor pendukung utama adalah adanya komitmen dan sikap terbuka dari kepala sekolah serta guru terhadap bimbingan pengawas. Komitmen ini merupakan manifestasi dari karakter kepemimpinan kepala sekolah yang kuat dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Dukungan dari komite sekolah dan masyarakat Hubikosi juga menjadi modal sosial yang besar bagi kelancaran kegiatan pendidikan. Guru-guru di sekolah ini sebenarnya memiliki antusiasme untuk meningkatkan cara mengajar mereka, namun mereka sering merasa terisolasi akibat kurangnya bimbingan teknis yang berkelanjutan (Mataputun, 2022).

Namun, faktor penghambat berupa kondisi geografis dan keterbatasan sarana prasarana masih menjadi kendala dominan yang melumpuhkan fungsi pengawasan. Distrik Hubikosi, meskipun tidak terlalu jauh dari Wamena, tetap memiliki tantangan aksesibilitas yang memakan waktu dan biaya transportasi yang tidak sedikit. Ketiadaan dana operasional yang memadai bagi pengawas menyebabkan frekuensi kunjungan menjadi sangat rendah. Anggaran pendidikan dari Dana Otsus sering kali tersedot untuk biaya logistik yang sangat tinggi, sehingga program pembinaan guru menjadi kekurangan dana. Hambatan fisik ini membuat niat baik pengawas sering kali kandas di tengah jalan akibat keterbatasan fasilitas pendukung (Eloper dkk., 2025).

Masalah ketiadaan listrik dan akses internet di sekolah juga menjadi faktor penghambat yang bersifat sistemik dalam implementasi kebijakan nasional. SMP Negeri 4 Wamena tidak dapat mengakses Platform Merdeka Mengajar secara optimal, yang berakibat pada ketertinggalan informasi mengenai modul-modul pelatihan terbaru. Hal ini menciptakan kesenjangan digital yang lebar antara sekolah di perkotaan dengan sekolah binaan di pedalaman. Rendahnya literasi digital dan infrastruktur yang tidak merata menjadi penghalang utama transformasi pendidikan di daerah terpencil. Tanpa intervensi khusus pada aspek sarana, pendampingan pengawas hanya akan menyentuh permukaan luar tanpa mampu mengubah substansi pembelajaran berbasis teknologi (Firdaus & Ritonga, 2024).

Faktor internal pengawas seperti beban kerja yang tidak ideal dan usia juga memengaruhi efektivitas pendampingan. Seorang pengawas di Jayawijaya sering kali harus membina lebih dari sepuluh sekolah yang lokasinya tersebar di berbagai distrik yang sulit dijangkau. Kondisi ini membuat energi mereka terkuras hanya untuk perjalanan fisik, bukan untuk aktivitas pedagogis. Selain itu, banyak pengawas sekolah yang berusia di atas 50 tahun mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang serba digital. Kualitas fisik dan literasi teknologi pengawas senior menjadi tantangan tersendiri dalam menyukseskan program Merdeka Belajar di wilayah 3T (Wicaksono & Zakso, 2025).

Selain itu, rendahnya input literasi dan numerasi siswa menjadi hambatan dalam pendampingan akademik yang bersifat normatif. Guru sering kali dipaksa melakukan "pengajaran dasar" bagi siswa SMP yang belum bisa membaca, yang di satu sisi membuat mereka sulit memenuhi target kurikulum nasional. Pengawas sekolah sering kali tidak memiliki strategi pendampingan khusus untuk menangani anomali ini, sehingga pendampingan yang diberikan menjadi tidak relevan. Karakter kepemimpinan yang adaptif sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan lokal yang berpihak pada kebutuhan murid. Faktor-faktor kompleks ini menuntut adanya kebijakan pengawasan yang bersifat asimetris dan spesifik untuk wilayah Papua (Mataputun, 2022).



Sebagai simpulan analisis faktor, diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal daerah dengan manajemen kepengawasan di Dinas Pendidikan. Dukungan anggaran operasional harus menjadi prioritas agar pengawas dapat menjalankan tugasnya tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pengawas dalam hal komunikasi dan manajemen perubahan diperlukan untuk mengatasi resistensi psikologis akibat tantangan lapangan yang berat. Dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalisir hambatan eksternal, peran pengawas sekolah diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 4 Wamena (Sapwan dkk., 2025).

Rumusan Model Pendampingan Pembelajaran: Refleksi-Kontekstual

Berdasarkan temuan masalah dan aspirasi informan, penelitian ini merumuskan Model Pendampingan Refleksi-Kontekstual yang adaptif bagi daerah terpencil di Papua Pegunungan. Model ini merupakan jawaban atas tuntutan sekolah yang menginginkan pengawas bukan sekadar penguji, melainkan mitra kolaboratif. Prinsip utama model ini adalah pengalihan fokus dari pengawasan administratif menuju supervisi berbasis kebutuhan nyata sekolah. Pengawas memulai siklus pendampingan dengan melakukan "Asesmen Kebutuhan Adaptif" yang mempertimbangkan keterbatasan sarana, bukan sekadar memaksakan standar nasional yang tidak mungkin tercapai di Hubikosi (Sari, Bunyamin, & Sudana, 2025).

Model ini menekankan pada "Kunjungan Blok Intensif" sebagai solusi atas masalah biaya transportasi dan medan yang berat. Daripada melakukan kunjungan singkat berkali-kali yang tidak efektif, pengawas disarankan melakukan kunjungan selama 3-5 hari penuh di satu sekolah binaan untuk menyelesaikan satu siklus pendampingan secara utuh. Selama masa kunjungan ini, pengawas benar-benar hidup bersama komunitas sekolah, memberikan contoh mengajar di kelas, dan membimbing Kombel secara langsung. Pendekatan ini memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan antara pengawas dan guru, yang merupakan faktor paling dominan dalam keberhasilan inovasi pendidikan di daerah terpencil (Nur Adyla dkk., 2022).

Elemen "Reflektif" dalam model ini diwujudkan melalui forum dialog sejawat yang bersifat non-hierarkis. Pengawas menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk membantu guru mengenali kelemahan dan kekuatan mereka sendiri dalam mengajar siswa yang memiliki hambatan literasi. Umpan balik yang diberikan tidak bersifat menghakimi, tetapi lebih kepada mencari solusi praktis atas kendala teknis di kelas. Budaya refleksi ini penting untuk membangun kemandirian profesional guru sehingga mereka mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan meskipun tanpa kehadiran pengawas di setiap saat (Isbianti dkk., 2021; Pardiawan et al., 2026; Seco & Cendana, 2022)

Elemen "Kontekstual" dalam model ini mengacu pada integrasi kearifan lokal dan penyesuaian kurikulum dengan lingkungan alam Papua. Pengawas membimbing guru untuk menggunakan sumber daya lingkungan di Hubikosi sebagai media pembelajaran, menggantikan alat peraga pabrikaan yang tidak tersedia. Misalnya, mengajarkan konsep numerasi melalui pola perkebunan tradisional atau konsep sains melalui siklus alam di Lembah Baliem. Pendampingan kontekstual ini menjamin bahwa pendidikan yang diterima siswa tetap relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari, sekaligus mempermudah guru dalam menyampaikan materi di tengah keterbatasan fasilitas (Marpaung, 2025; İlhami et al., 2020; Kaize et al., 2025; Marian et al., 2026)

Selanjutnya, model ini memperkuat peran kepala sekolah sebagai "Supervisor Internal" yang bekerja sinergis dengan pengawas melalui penguatan karakter kepemimpinan pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki karakter yang tangguh, jujur, dan visioner agar mampu melanjutkan pendampingan harian saat pengawas sudah kembali ke kota. Sinergi ini



memastikan keberlanjutan program perbaikan pembelajaran di sekolah. Untuk mengatasi masalah pelaporan, model ini memperkenalkan pelaporan yang lebih sederhana namun tetap akuntabel yang mendokumentasikan poin-poin refleksi dan foto kegiatan sebagai bukti kinerja yang efisien (Mataputun, 2022; Atsauri et al., 2026; Ratnawati et al., 2026; Yuningsih & Wasliman, 2026).

Secara keseluruhan, Model Pendampingan Refleksi-Kontekstual ini diharapkan menjadi terobosan strategis dalam pemerataan standar mutu pendidikan di wilayah Papua Pegunungan. Implementasi model ini memerlukan dukungan kebijakan asimetris dari pemerintah daerah, termasuk alokasi dana khusus pendampingan 3T. Melalui model yang manusiawi, adaptif, dan berorientasi pada proses ini, peran pengawas sekolah di SMP Negeri 4 Wamena diharapkan mampu mengubah tantangan geografis menjadi peluang bagi lahirnya inovasi pembelajaran yang memerdekakan anak-anak di pedalaman Papua (Imamah, Rahayuliana, & Marini, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pengawas sekolah dalam pendampingan pembelajaran di daerah pedalaman belum berjalan secara optimal karena masih terjebak pada pola administratif konvensional. Transformasi peran pengawas menjadi mitra pendamping belum sepenuhnya terwujud di lapangan, yang dibuktikan dengan ketiadaan dokumen perencanaan kerja yang sistematis serta minimnya pelaksanaan supervisi klinis di dalam kelas. Mekanisme pelaporan kinerja juga masih disampaikan secara lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis yang akuntabel. Efektivitas supervisi kolaboratif ini terhambat secara sistemik oleh kendala geografis yang ekstrem, beban kerja berlebih, serta ketiadaan akses listrik di sekolah binaan. Akibatnya, fungsi pengawas sebagai motor penggerak perubahan pendidikan menjadi lumpuh dan kurang mampu menjawab tantangan rendahnya kemampuan literasi dasar siswa di wilayah khusus tersebut.

Dinas pendidikan daerah disarankan untuk menerapkan model pendampingan refleksi kontekstual melalui strategi kunjungan blok intensif guna mengatasi kendala geografis dan efisiensi biaya transportasi pengawas. Pihak otoritas perlu memfasilitasi pengalokasian dana operasional khusus serta menyediakan modul pelatihan *coaching* yang berfokus pada penanganan literasi dasar secara luring. Pengawas sekolah hendaknya mulai meninggalkan pola pengawasan administratif yang kaku dan beralih membimbing guru memanfaatkan media alam lokal sebagai sarana pembelajaran interaktif. Kepala sekolah juga harus diperkuat kapasitas manajerialnya agar mampu menjalankan peran sebagai supervisor internal yang konsisten saat pengawas tidak berada di tempat. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk melakukan uji implementasi model ini secara eksperimental pada beberapa sekolah binaan di wilayah terpencil lainnya demi mewujudkan pemerataan standar mutu pendidikan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyifah, Y. N., Suryaningsih, R., & Nurman, N. (2024). Efektivitas supervisi klinis dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di sekolah dasar. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 6(1), 152–164. <https://doi.org/10.52690/jitim.v5i2.1002>
- Atsauri, M. S., Sukarman, S., & Kurniawan, M. A. (2026). Implementasi teknologi digital dalam penyusunan rencana kerja sekolah: Systematic literature review.



- LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 6(2), 775–794. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i2.8982>
- Elopere, P., Tutuarima, F., & Ratuanak, A. M. D. (2025). Akses dan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan selama pemberlakuan Otonomi Khusus. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 2(2), 1067–1076. <https://doi.org/10.57235/sakola.v2i2.7171>
- Firdaus, & Ritonga. (2025). Tantangan implementasi smart education di daerah terpencil: Kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. *Frontiers in Education*, 10, Article 1552575. <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1552575>
- Ilhami, A., Syahvira, R., Maisarah, U., & Diniya, D. (2020). Kajian etnosains tradisi maaowo di Danau Bakuok sebagai sumber pembelajaran biologi. *Bioeduca: Journal of Biology Education*, 2(2), 13–13. <https://doi.org/10.21580/bioeduca.v2i2.6326>
- Imamah, I., Rahayuliana, R., & Marini, S. (2023). Implementasi Kurikulum RA menuju Merdeka Belajar dalam konteks literasi digital. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(9), 3803–3813. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i9.11444>
- Isbianti, N., & Arbaatun, A. (2021). Pendampingan digitalisasi arsip melalui metode in-on-in pada pegawai sekolah dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 11(2), 166–172. <https://doi.org/10.24246/j.js.2021.v11.i2.p166-172>
- Kaize, B. R., Sulistyowati, R. W., & Suteki, M. (2025). Eksplorasi kearifan lokal Papua Selatan sebagai basis pengembangan media pembelajaran IPA kontekstual pada jenjang PAUD dan sekolah dasar. *SCIENCE: Jurnal Inovasi Pendidikan Matematika Dan IPA*, 5(4), 1645–1657. <https://doi.org/10.51878/science.v5i4.7545>
- Karuru, P., Rifky, S., Nugroho, A., Karwanto, K., Wote, A. Y. V., & Mumtahanah, M. (2024). Peran pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.51178/jppp.v3i3.185>
- Majdi, A. (2023). Inovasi pembelajaran abad 21: Peluang dan tantangan implementasi di sekolah dasar. *Akmen: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 198–208. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i2.1719>
- Marian, D. Y. S., Sukiastini, I. G. A. N. K., Yofoby, H., Medlama, M., Ledang, H. B., & Meage, Y. (2026). Etnopedagogi bakar batu: Mengintegrasikan pendidikan dan budaya lokal di Wamena. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 6(1), 375–387. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i1.9662>
- Marpaung, R. W. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka: Relevansi pembelajaran mendalam dengan kebutuhan edukasional di Papua. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 36599–36612. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.6059>
- Mataputun, Y. (2022). Kepemimpinan pendidikan: Penguatan karakter kepala sekolah. CV. Penerbit Qiara Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pardiyawan, P., Sugiantoro, S., Ali, M., Afdal, M., Khaeruddin, K., & Victorynie, I. (2026). Rekonseptualisasi diklat guru dalam pengembangan profesional berkelanjutan: Analisis literatur. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(2), 962–984. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i2.9689>



- Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan.
- Ratnawati, E., Kristiyani, N., Azainil, A., Nugroho, D., & Bukari, M. R. (2026). Kepemimpinan digital sebagai penggerak transformasi manajemen sekolah menuju pembelajaran berbasis Chromebook di SMP. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 419–431. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9717>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Sapwan, A., Meirawan, D., Satori, D., & Sutarsih, C. (2025). Supervisi pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(2), 1723–1730. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2.4298>
- Sari, A., Bunyamin, B., & Sudana, I. M. (2025). The influence of instructional leadership, professional development, and academic supervision on teacher performance. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 15(3), 251–259. <https://doi.org/10.24246/j.js.2025.v15.i3.p251-259>
- Seco, V. Y. R., & Cendana, W. (2022). Penerapan refleksi pribadi untuk membantu guru menjalankan peran sebagai fasilitator pada pembelajaran daring. *Padma Sari: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 103–116. <https://doi.org/10.53977/ps.v1i02.371>
- Silvester, S., Saputro, T. V. D., & Manggu, B. (2024). Pendampingan literasi digital bagi guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 918–929. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i4.2276>
- Sudrajat, A. (2020). Supervisi akademik dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pendidikan*, 11(1), 45–55.
- Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Werdiningsih. (2024). Developing a community-based academic supervision model: A strategic reform for enhancing professional learning in Indonesian primary schools. *Journal of Educational Supervision*, 7(9), 47–55. <https://doi.org/10.31045/jes.7.9.5>
- Wicaksono, L., & Zakso, A. (2025). Peran pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Sektor Barat Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 279–293. <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v14i1.84159>
- Yuningsih, Y., & Wasliman, E. D. (2026). Kepemimpinan kepala sekolah dalam pemanfaatan rapor pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah dasar. *MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 6(1), 213–224. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v6i1.9409>